

URUSAN EKS. BAU

URUSAN EKS. BAU

- I. PROGRAM MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
- II. PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

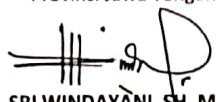
1. PROGRAM MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.815.000.000
1. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	65.000.000
2. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	300.000.000
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	700.000.000
4. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	150.000.000
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.500.000.000
6. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	1.300.000.000
7. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	200.000.000
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat Daerah	60.000.000
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/rumah Dinas/gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/operasional Perangkat Daerah	1.200.000.000
10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	70.000.000
11. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.000.000.000
12. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	145.000.000
13. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	125.000.000
14. Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	500.000.000
15. Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	500.000.000

PROPOSAL USULAN RENCANA KEGIATAN
DINAS : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWATENGGAH
APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM	:	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
KEGIATAN	:	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah.				
1. Latar Belakang	:					
a. Kondisi Eksisting	:	Dalam Rangka menunjang kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi baik di Dalam maupun Luar Daerah untuk melancarkan koordinasi dan konsultasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah baik yang terencana maupun tidak tidak direncanakan.				
b. Permasalahan	:	Belum tersedianya akomodasi dan transportasi untuk menunjang rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kegiatan tugas-tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah keluar daerah maupun dalam daerah.				
2. Maksud dan Tujuan	:	Menyediakan Dana akomodasi dan transportasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi untuk Kegiatan - kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan tugas baik dalam maupun luar daerah.				
3. Sasaran	:					
a. Fokus Pekerjaan	:	Tersedianya akomodasi untuk memenuhi keperluan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah maupun dalam daerah bagi Pejabat Struktural dan Staf Potensi di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.				
b. Lokasi Pekerjaan	:	Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah serta luar Provinsi Jawa Tengah.				
4. Keluaran /Output	:	Tersedianya dana rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.				
5. Hasil / Outcome	:	Terwujudnya kelancaran rapat - rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah untuk Pejabat Struktural dan Staf yang potensi di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.				
6. Dampak /Impact	:	Terpenuhi akomodasi dan transportasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi tugas baik dalam daerah maupun luar daerah yang berhubungan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.				
7. Kebutuhan Pendanaan	:	Rp. 1.250.000.000,00 (Satu Milyard Dua Ratus Lima Puluh Juta Rippih)				
8. Jadwal Pelaksanaan	:	1 Tahun Anggaran.				
9. Foto Kondisi 0 %	:					
<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Keterangan :</td><td>Keterangan :</td></tr></table>					Keterangan :	Keterangan :
Keterangan :	Keterangan :					

Semarang, April 2019

Disusun Oleh :
Kepala Sub Bagian Keuangan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah


SRI WINDAYANI, SH. MM.
Nip. 19960708 198810 2 001.

Diketahui Oleh,
Sekretaris
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah


Ir. ARIEF FRIYOGA, CES.
Nip. 19630615 199203 1 009.

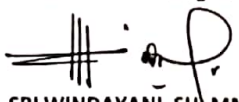
PROPOSAL USULAN RENCANA KEGIATAN
DINAS : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWATENGAH
APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM	:	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN	:	Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1. Latar Belakang	:	
a. Kondisi Eksisting	:	Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat berjalan lancar, bedaya guna dan berhasil guna.
b. Permasalahan	:	Diperlukannya dan tersedianya Sistem dan Prosedur serta dana Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dalam Penyajian Laporan Realisasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah yang baik terhadap Pelaksanaan Anggaran.
2. Maksud dan Tujuan	:	Menyediakan Dana untuk Kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagai penunjang Pelaporan Keuangan meliputi Ralisasi Anggaran, Neraca dan Pelaporan Arus Kas yang ditujukan memenuhi Kebutuhan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
3. Sasaran	:	
a. Fokus Pekerjaan	:	Peningkat Sumber Daya Aparatur dalam Penguasaan Pengetahuan dan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.
b. Lokasi Pekerjaan	:	Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
4. Keluaran /Output	:	Tersedianya dana untuk kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
5. Hasil / Outcome	:	Peningkatan Sumber Daya Aparatur , Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
6. Dampak /Impact	:	Penyampaian / penyediaan informasi tentang Pelaksana APBD Tahun berjalan, Neraca dan Laporan Keuangan, yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana Kegiatan Operasional dan Hasil yang direalisasikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
7. Kebutuhan Pendanaan	:	Rp. 65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
8. Jadwal Pelaksanaan	:	di Laksanakan tiap 3 Bulan (Tri Wulan).
9. Foto Kondisi 0 %	:	

Keterangan :	Keterangan :
--------------	--------------

Semarang, April 2019

Disusun Oleh :
 Kepala Sub Bagian Keuangan
 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Provinsi Jawa Tengah


SRI WINDAYANI, SHI MM.
 Nip. 19960708 198810 2 001.

Diketahui Oleh,
 Sekretaris
 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Provinsi Jawa Tengah


Ir. ARIEF FRIYOGA, CES.
 Nip. 19630615 199203 1 009.

II. PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.100.000.000

- | | |
|--|-------------|
| 1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 550.000.000 |
| 2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 550.000.000 |

PROPOSAL USULAN RENCANA KEGIATAN
DINAS: PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM	:	Penyusunan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
KEGIATAN	:	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Latar Belakang	:	
a. Kondisi Eksisting	:	Proses monitoring dan evaluasi dalam setiap program kegiatan sangat perlu dilaksanakan. Hal ini untuk memantau dan mengidentifikasi proses dan hasil pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada proses perencanaan. Selain itu juga untuk mengetahui kendala dan hambatan yang kemungkinan muncul sehingga kedepannya dapat dicegah agar tidak terjadi lagi. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini sebagai masukan dalam perencanaan berikutnya. Terkait dengan perihal tersebut maka diperlukan suatu kegiatan yang dapat mewadahi proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Pada pelaksanaan proses penyusunan dokumen evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah maka diwadahi dalam Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini dokumen evaluasi kinerja yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan menjadi umpan balik bagi proses perencanaan kedepannya.
b. Permasalahan	:	Pergerakan data capaian program/ kegiatan yang dinamis dapat mengakibatkan adanya ketidaksinkronan antar dokumen laporan capaian kinerja yang menjadikan laporan tidak akuntabel.
2. Maksud dan Tujuan	:	Menyusun dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
3. Sasaran	:	
a. Fokus Pekerjaan	:	Penyusunan dokumen evaluasi kinerja seluruh bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
b. Lokasi Pekerjaan	:	Provinsi Jawa Tengah
4. Keluaran/Output	:	1) 1 (Satu) Dokumen Laporan Monev dan Pengendalian Kegiatan Tahun Berjalan; 2) 1 (Satu) Dokumen LKPJ tahun 2019; 3) 1 (Satu) Dokumen LKjIP tahun 2019; 4) 1 (Satu) Dokumen LPPD tahun 2019; 5) 3 (Tiga) Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Triwulanan (Renja, RKPD serta SAKIP);
5. Hasil/Outcome	:	Tersusunnya dokumen evaluasi dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah yang terukur dan akuntabel pada pelaksanaan tahun anggaran kegiatan.
6. Dampak/Impact	:	Adanya perbaikan dan peningkatan kinerja SKPD serta dokumen pelaporan capaian dan evaluasi kinerja SKPD

		yang berkualitas.
7. Kebutuhan Pendanaan	:	Rp 550.000.000
8. Jadwal Pelaksanaan	:	12 bulan
9. Foto Kondisi 0%	:	



Keterangan : Dokumentasi Rapat Pengendalian Tingkat OPD Status Februari 2019



Keterangan : Dokumentasi Rapat Pengendalian Tingkat OPD Status Januari 2019

Semarang,

April 2019

Disusun Oleh:
Kepala Sub Bagian Program

Poernomo Puspo Susilo, S.E., M.M.

Pembina
NIP. 19660620 199203 1 014

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Ir. Arief Friyoga, CES

Pembina Tk. I
NIP. 19630615 199203 1 009

**URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR**

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

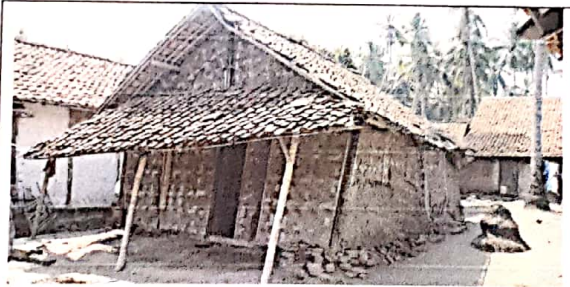
- I. PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN**
- II. PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN**
- III. PROGRAM KETERPADUAN PERUMAHAN , KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	15.750.000.000
1. Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya	3.250.000.000
2. Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah terdampak Bencana , Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah , Rusun dan Rusus beserta PSUnya	9.500.000.000
3. Kegiatan Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan	3.000.000.000

**PROPOSAL USULAN RENCANA KEGIATAN
DINAS: PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020**

PROGRAM	:	Pembangunan Perumahan
KEGIATAN	:	Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya
1. Latar Belakang	:	
a. Kondisi Eksisting	:	Tingginya tingkat Rumah Tidak Layak Huni di Desa/ Kelurahan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan DTPFMOTM Tahun 2019.
b. Permasalahan	:	Tingginya jumlah masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni di Desa/Kelurahan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan DTPFMOTM Tahun 2019 serta tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas rumahnya menjadi lebih layak huni.
2. Maksud dan Tujuan	:	1. Maksud kegiatan ini adalah melakukan verifikasi administrasi proposal dan pencairan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pemanfaatan Bantuan Keuangan RTLH. 2. Tujuan kegiatan ini adalah termanfaatkannya Bankeupemdes RTLH dan BankeuKab/kota RTLH secara tepat sasaran.
3. Sasaran	:	1. Tersosialisasinya Kegiatan Bankeupemdes dan BankeuKab RTLH dari Pemerintah Provinsi dalam hal ini oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Kota dalam hal ini Bappeda dan Dinas Perumahan Kabupaten/ Kota; 2. Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pengusulan, Pencairan dan Pelaksanaan Kegiatan Bankeupemdes RTLH kepada Tim Pelaksana Teknis Bidang Perumahan, Tim Teknis Terpadu Provinsi Jawa Tengah dan Tim Teknis Kabupaten/ Kota; 3. Terlaksanakannya Evaluasi Kegiatan Bankeupemdes RTLH oleh Tim Pelaksana Teknis Bidang Perumahan, Tim Teknis Terpadu Provinsi Jawa Tengah dan Tim Teknis Kabupaten/ Kota; 4. Terlaksanakannya Koordinasi Pelaporan (LPJ) Kegiatan Bankeupemdes RTLH oleh Tim Pelaksana Teknis Bidang Perumahan, Tim Teknis Terpadu Provinsi Jawa Tengah dan Tim Teknis Kabupaten/ Kota; 5. Terlaksanakannya Bimtek Kemitraan Penanganan RTLH oleh Tim Teknis Bidang Perumahan, Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; 6. Terlaksanakannya <i>update</i> Sistem Informasi RTLH;

		7. Terlaksanakannya Stimulan Pembangunan terhadap Rumah Tidak Layak Huni yang masuk dalam kategori DTPFMOTM agar meningkat menjadi rumah yang lebih Layak Huni.
a. Fokus Pekerjaan	:	melakukan verifikasi administrasi proposal dan pencairan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pemanfaatan Bantuan Keuangan RTLH.
b. Lokasi Pekerjaan	:	Desa di 29 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Kelurahan di 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Keluaran/Output	:	25.677 unit Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani dengan rincian 3 calon Penerima Manfaat per desa di 7.809 desa di Provinsi Jawa Tengah dan 3 calon penerima manfaat per Kelurahan di 750 Kelurahan di Provinsi Jawa Tengah.
5. Hasil/Outcome	:	Tertanganinya 25.677 unit Rumah Tidak Layak Huni menjadi layak huni dengan rincian 3 calon Penerima Manfaat per desa di 7.809 desa di Provinsi Jawa Tengah dan 3 calon penerima manfaat per Kelurahan di 750 Kelurahan di Provinsi Jawa Tengah;
6. Dampak/Impact	:	Menurunkan angka kemiskinan yang berdasarkan pada <i>database</i> DTPFMOTM 2019.
7. Kebutuhan Pendanaan	:	Rp 3.250.000.000,- (sesuai Renstra/Renja) (dilampiri dengan RAB lengkap)
8. Jadwal Pelaksanaan	:	12 Bulan (<i>Time Schedule</i> terlampir)
9. Foto Kondisi 0%	:	
		
Keterangan : Salah satu contoh Rumah Tidak Layak Huni yang perlu dibantu		

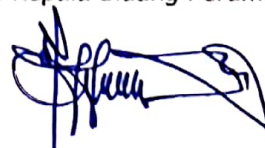
Semarang, ... April 2019

Disusun Oleh:
Plt Kepala Seksi Perumahan Swadaya



Suprpta, SH, MT
Pembina
NIP 19660611 198809 1001

Diketahui Oleh:
Plt. Kepala Bidang Perumahan



Ir. EFFENDI NUGROHO W, MT.
Pembina Tk I
NIP. 19621023 198810 1 001

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

II. PROGRAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.681.500.000
1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	481.500.000
2. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Kumuh	950.000.000
3. Kegiatan Penanganan Pengembangan Psu Kawasan Permukiman	4.250.000.000

PROPOSAL USULAN RENCANA KEGIATAN
DINAS: PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM	:	PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN	:	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN PERMUKIMAN
1. Latar Belakang	:	
a. Kondisi Eksisting	:	Guna mewujudkan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan pada skala pemerintah daerah provinsi dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah, dibutuhkan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman yang dimulai pada Tahun Anggaran 2020 dengan sub kegiatan fasilitasi penanganan kawasan permukiman, penyusunan perencanaan teknis kawasan permukiman dan pengawasan kawasan permukiman. Pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kab/Kota terkait penanganan kawasan permukiman, Melaksanakan perencanaan teknis penanganan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Tengah dan Penyelenggaraan bimbingan teknis, pemantauan, monitoring dan evaluasi penanganan kawasan permukiman.
b. Permasalahan	:	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman yang dimulai pada Tahun Anggaran 2020 dengan sub kegiatan fasilitasi penanganan kawasan permukiman, penyusunan perencanaan teknis kawasan permukiman dan pengawasan kawasan permukiman.
2. Maksud dan Tujuan	:	Maksud dari kegiatan perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman ini adalah mewujudkan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman ini adalah: Tersinerginya penanganan kawasan permukiman antara

		pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kab/Kota; Terlaksananya perencanaan teknis penanganan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Tengah; Terselenggaranya bimbingan teknis, pemantauan, monitoring dan evaluasi penanganan kawasan permukiman.
3. Sasaran	:	
a. Fokus Pekerjaan	:	Sasaran dari Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman ini adalah: Fasilitasi penanganan kawasan permukiman Penyusunan perencanaan teknis kawasan permukiman Pengawasan kawasan permukiman
b. Lokasi Pekerjaan	:	Kota Semarang
4. Keluaran/Output	:	Keluaran dari Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman ini adalah: • Diseminasi, Pembinaan Teknis • Studi-studi penanganan kawasan permukiman • Bimbingan Teknis
5. Hasil/Outcome	:	Manfaat yang langsung dirasakan setelah kegiatan diselesaikan yakni terencana dan terkendalinya Kawasan Permukiman
6. Dampak/Impact	:	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki dampak berupa Tertanganinya Kualitas Kawasan Permukiman.
7. Kebutuhan Pendanaan	:	Rp 950.000.000,-
8. Jadwal Pelaksanaan	:	12 Bulan

9. Foto Kondisi 0%

:

-	-
Keterangan :	Keterangan :

Semarang, 24 April 2019

Disusun Oleh:
Kepala Seksi Perencanaan Teknis
Kawasan Permukiman



Sri Wiharnanto, ST, MT
Pembina
NIP. 19670207 199003 1 005

Diketahui Oleh:
Kepala Bidang Kawasan Permukiman



Ir. Prihastoto, MT
Pembina Tk. I
NIP. 196210251990031005

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

III. PROGRAM KETERPADUAN PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2.235.000.000

1. Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 850.000.000
2. Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 850.000.000
3. Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 535.000.000

PROPOSAL USULAN RENCANA KEGIATAN
DINAS: PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM	:	Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KEGIATAN	:	Penyusunan, Pengelolaan, Dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
1. Latar Belakang	:	
a. Kondisi Eksisting	:	• Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut masih mengalami berbagai kendala. Dalam mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman, setiap prosesnya dilaksanakan secara bertahap yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan • Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, diperlukan kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu serta keterpaduan pelaksanaan yang mengacu pada sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ditetapkan dalam RPJMN maupun RPJMD • Untuk menghasilkan kebijakan dan strategi yang baik, perlu adanya dukungan data dan database yang akurat dan akuntabel. Oleh sebab itu diinisiasi adanya kebijakan "Satu Data Indonesia" oleh Pemerintah yang tertuang dalam SE Menteri PAN-RB No.5/2014 tentang Revitalisasi Unit Data dan Informasi Kementerian dan Lembaga dengan tujuan mewujudkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola Data pemerintah • Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang yaitu salah satunya menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi • Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2016 tentang <i>Single Data System</i> untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah, menyebutkan bahwa <i>Single Data System</i> untuk Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan Daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan
b. Permasalahan	:	• Basis data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah masih diisi secara manual menggunakan format – format data yang disebarakan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota • Belum adanya mekanisme pengisian data oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait yang terstruktur dan terintegrasi sesuai standart serta ketentuan yang berlaku

		• Belum sinkronnya data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah yang ada pada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota serta pihak pelaksana teknis terkait lainnya • Kebutuhan akses data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang semakin meningkat • Kebutuhan pemutakhiran data yang lebih cepat, tepat, dan dengan standart yang sama • Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) serta aplikasi basis data yang telah tersusun masih belum sempurna & memerlukan updating berkala • Perlunya perbaikan dan pengembangan Sistem Informasi serta Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah sesuai hasil review pelaksanaan dan penggunaan pada tahun sebelumnya • Perlunya Integrasi Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah dengan <i>Single Data System</i> Jawa Tengah & Sistem Informasi sejenis di DISPERAKIM Prov. Jateng
2. Maksud dan Tujuan	:	Maksud : mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam penyediaan basis data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mutakhir, terkini dan dikelola dengan baik serta memenuhi amanat keterbukaan informasi publik dan <i>single data system</i> Jawa Tengah. Tujuan : 1. Melakukan pemutakhiran /<i>updating</i> dan pengelolaan data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah yang akurat dan terkini sampai dengan status Tahun 2019; 2. Mereviu dan mengembangkan aplikasi basis data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah; 3. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai alat bantu dalam proses perencanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan, bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; 4. Mengembangkan dan memutakhirkan website DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu sarana publikasi dan menyampaikan informasi publik; 5. Melaksanakan Forum Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai salah satu upaya peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan baik itu pengguna data, produsen data maupun wali data
3. Sasaran	:	
a. Fokus Pekerjaan	:	1. Pemutakhiran /<i>updating</i> dan pengelolaan data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Jawa Tengah sampai dengan status Tahun 2019, sub kegiatan ; - Rapat – rapat koordinasi - FGD dengan Kab/Kota - KI Pemutakhiran Data PKPP 2. Pengembangan Aplikasi Basis Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah 3. Pengembangan Sistem Informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Dibantu KI Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informasi

		4. Pengembangan Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 5. Forum Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
b. Lokasi Pekerjaan	:	Kota Semarang : Untuk lokasi pelaksanaan kegiatan pihak ketiga & Admin sistem informasi serta aplikasi basis data 35 Kab/Kota di Jawa Tengah : Untuk Lokasi input Aplikasi basis data 6 Eks Karesidenan di Jawa Tengah : Untuk lokasi Rapat Konsolidasi data / FGD dengan Kab/Kota 2 Kab/Kota (Surakarta/Kota Pekalongan/ Salatiga/ Semarang) : Untuk lokasi pelaksanaan Forum Data
4. Keluaran/Output	:	1. 1 Dokumen Basis Data PKPP 2. 1 Dokumen & Aplikasi Pengembangan Basis Data PKPP 3. 1 Dokumen & Aplikasi Pengembangan Sistem Informasi PKPP 4. 1 Dokumen & Aplikasi Pengembangan Website DISPERAKIM 5. 1 Dokumen pelaksanaan Forum Data PKPP
5. Hasil/Outcome	:	1. Tersedianya data Bidang Perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah yang akurat dan terkini sampai dengan status akhir tahun 2019 (1 data) 2. Jumlah pengguna aplikasi basis data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Provinsi Jawa Tengah (70 orang/institusi) 3. Jumlah pengguna dan pengunjung sistem informasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah (100 orang/institusi) 4. Jumlah Pengunjung Website DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (300 orang) 5. Jumlah Peserta Forum Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (220 orang)
6. Dampak/Impact	:	1. Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang terintegrasi, valid, terkini dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Terpenuhinya amanat Undang – Undang bagi Pemerintah Provinsi dalam menyediakan data PKP 3. Proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan dapat lebih cepat dan valid 4. Kecepatan akses terhadap data dan hasil pembangunan bidang PKP dapat terpenuhi 5. Proses perencanaan yang lebih valid dan terarah berdasar data yang baik dan benar
7. Kebutuhan Pendanaan	:	Rp 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
8. Jadwal Pelaksanaan	:	12 Bulan - Koordinasi & Persiapan : Januari - Proses Pengadaan : Februari – Juni - KI Pemutakhiran Data : Februari – Desember - KI Pemeliharaan Jaringan dan SI : Maret – Desember - Pengembangan Aplikasi Basis Data : Maret – Juni - Pengembangan Sistem Informasi : Juli – Oktober - Pengembangan Website : Maret – April - Forum Data : Maret & November - Pemutakhiran & Pengelolaan Data : Februari – Desember

9. Foto Kondisi 0%

: -

(Dilampiri dengan foto kondisi yang menggambarkan permasalahan pada titik yang akan dikerjakan pada TA 2020)

(Dilampiri dengan foto kondisi yang menggambarkan permasalahan pada titik yang akan dikerjakan pada TA 2020)

Keterangan :

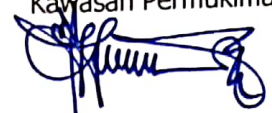
Keterangan :

Semarang, 24 April 2019

Disusun Oleh:
Kepala Seksi Pengelolaan Data
Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertahanan


A.Y. Mandarika, ST, MSc, MEng.
Penata Tingkat I
NIP. 19800129 200604 2 007

Diketahui Oleh:
Bidang Keterpaduan Perumahan dan
Kawasan Permukiman


Ir. Effendi Nugroho W, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19621023 198810 1 001

**URUSAN WAJIB
BUKAN PELAYANAN
DASAR**

I.	PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	2.550.000.000
1.	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	890.000.000
2.	Kegiatan Penanganan Permasalahan Pertanahan	790.000.000
3.	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	870.000.000

PROPOSAL USULAN RENCANA KEGIATAN
DINAS: PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM	:	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
KEGIATAN	:	Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
1. Latar Belakang	:	
a. Kondisi Eksisting	:	Sub Kegiatan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui proses pengadaan tanah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum bahwa, "Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya dijelaskan pula pada ayat (2), yaitu "Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Jadi diperlukan kesepahaman dan kesepakatan masyarakat tentang adanya suatu pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah mereka. Untuk itu perlukan koordinasi dengan 35 kabupaten/kota ataupun dengan instansi vertikal yang membidangi pengadan tanah. Dalam penyelenggaraan tahapan pengadaan tanah khususnya pada tahapan persiapan pengadaan tanah maka dibutuhkan aplikasi informasi penyelenggaraan pengadaan tanah yang dapat mempermudah instansi yang memerlukan tanah menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah yang sesuai dengan peraturan pengadaan tanah. Perlu adanya Koordinasi dan Penyamaan Persepsi /sharing permasalahan penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan berbagai wilayah di tanah air. Sub Kegiatan Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan Berupa Zonasi Nilai Tanah Secara teknis fungsi kegunaan ZNT tersebut menyajikan nilai – nilai tanah berdasarkan zona tertentu yang didapat dari hasil survay dilapangan. Kelak ZNT tersebut berguna dalam menentukan tarif pelayanan pertanahan berdasarkan Peratutran Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak. Disisi yang lain ZNT yang ditetapkan selama ini masih memunculkan berbagai persoalan di pasar tanah salah satunya disebabkan oleh sampel yang digunakan terlalu sedikit mengingat di Jawa Tengah terdapat 34.000 klasifikasi dalam ZNT, sehingga ke depan dengan adanya

		penambahan sample akan mendekati nilai tanah sesuai dengan kondisi riil tanah.
b. Permasalahan	:	Sub kegiatan Penetapan Lokasi : - Belum tersedianya tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum - Diperlukan Penetapan Lokasi untuk melindungi tanah masyarakat dari para spekulan tanah - Belum adanya pemahaman dari pemerintah kabupaten/kota tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum - Diperlukan konsultasi dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan bagi pembangunan untuk kepentingan umum - Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap sistem verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah Sub kegiatan peningkatan tertib administrasi pertanahan berupa zonasi nilai tanah : - belum tersedianya peta zonasi nilai tanah oleh pemerintah provinsi jawa tengah - adanya kesulitan dalam menentukan prakiraan nilai tanah dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah - mengetahui prakiraan nilai dengan kondisi riil
2. Maksud dan Tujuan	:	a. Sub Kegiatan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Maksud : Peningkatan penyelesaian kompleksitas permasalahan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan. Tujuan : - Terciptanya aparatur yang kompeten dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa Tengah, melalui orientasi wilayah/ sharing dengan Provinsi yang lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. - Terdapatnya berbagai referensi dalam penyelenggaraan pengadaan tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Sub Kegiatan Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan Berupa Zonasi Nilai Tanah Maksud : - Untuk mengetahui harga tanah dalam suatu wilayah kawasan tertentu. - Untuk memastikan harga tanah yang dapat dituangkan

		dalam perencanaan pengadaan tanah. c) Untuk mendapatkan updating harga tanah dalam suatu wilayah d) Menghindari para spekulan tanah Tujuan : a) Terwujudnya harga pasar tanah yang sesuai dengan aksesibilitas tanah; b) Terkendalinya harga pasar tanah dimasyarakat; c) Terciptanya tertib administrasi pertanahan berupa zonasi nilai tanah guna kepentingan penyusunan dokumen penyelenggaraan pengadaan tanah. d) Menyediakan informasi zona nilai tanah serta mengendalikan para spekulan tanah.
3. Sasaran	:	
a. Fokus Pekerjaan	:	Fokus Pekerjaan : a) Fasilitas persiapan pengadaan tanah dan evaluasi pengadaan tanah di 35 Kab/Kota. b) Tim persiapan dan sekretariat tim persiapan pengadaan tanah Provinsi Jawa Tengah. c) Instansi yang memerlukan tanah meliputi pemerintah 35 Kab/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. d) Tertib administrasi pertanahan dengan melakukan pemetaan Zonasi Nilai Tanah
b. Lokasi Pekerjaan	:	Sasaran Zonasi tersebut dimaksud dilaksanakan di 7 (tujuh) Kab/Kota meliputi yaitu : a) Kabupaten Brebes b) Kabupaten Tegal c) Kabupaten Batang; d) Kabupaten Pekalongan e) Kota Pekalongan f) Kota Tegal g) Kabupaten Kendal
4. Keluaran/Output	:	1) Jumlah Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang terfasilitasi di 35 Kab/Kota; 2) Jumlah tertib administrasi pertanahan di 7 Kab/Kota berupa zonasi nilai tanah dengan terbitnya peta zonasi.
5. Hasil/Outcome	:	1) Meningkatnya penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; 2) Terciptanya sistem Informasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 3) Memberikan informasi kepada pengguna atau instansi pemerintah dalam membuat perkiraan nilai tanah 4) Mengendalikan harga tanah yang akan digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum
6. Dampak/Impact	:	1) Tersedianya tanah yang digunakan bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 2) Memberikan kemudahan dalam memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah. 3) .Mempermudah Instansi pengguna tanah / masyarakat

		/ swasta bila memerlukan pengadaan tanah; 4) Dapat digunakan oleh Instansi pengguna dalam menetapkan nilai harga tanah.
7. Kebutuhan Pendanaan	:	Rp. 890.000.000,-
8. Jadwal Pelaksanaan	:	a. Penetapan Lokasi Januari s/d Desember 2020 b. Rakortek Agustus 2020 c. Zonasi Pebruari s/d Nopember 2020
9. Foto Kondisi 0%	:	-

(Dilampiri dengan foto kondisi yang menggambarkan permasalahan pada titik yang akan dikerjakan pada TA 2020)	(Dilampiri dengan foto kondisi yang menggambarkan permasalahan pada titik yang akan dikerjakan pada TA 2020)
Keterangan :	Keterangan :

Semarang, ... April 2019

Disusun Oleh:
Kepala Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah



FAISA MUKTI SEPTYANI, S.Sos, M.Si

Penata Tk. I
NIP. 19710919 199412 1 001

Diketahui Oleh:
Kepala Bidang Pertanahan



ENDRO HUDIYONO, AP,SH,MM

Pembina Tk. I
NIP. 19760519 199412 1 001